

# Pengembangan Pendidikan Kewarganegaraan Demokratis di Amerika Serikat

Eva Nur Hidayah<sup>\*1</sup>, Alil Rinenggo<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Prodi PPKn, Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta

<sup>2</sup>Prodi PPKn, Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI

E-mail: <sup>\*1</sup>en.hidayah11@gmail.com, <sup>2</sup>rinenggoalil@gmail.com

## Abstrak

Pendidikan kewarganegaraan diberikan oleh setiap negara bertujuan untuk membimbing dan membentuk karakter warga negara yang baik dan mewujudkan warga negara yang demokratis. Amerika Serikat merupakan negara yang menginisiasi pelajaran pendidikan kewarganegaraan dan salah satu negara adikuasa di dunia karena kekuatan ekonomi dan politiknya. Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini menggunakan metode *literature review* dengan sumber data utama yaitu data kepustakaan, terdiri dari: buku, jurnal, dan situs internet yang terkait dengan topik. Teknik analisis data yang digunakan dalam artikel ini yaitu analisis isi (*content analysis*). Pembahasan artikel ini difokuskan pada kebijakan nasional dan konten kurikulum pendidikan kewarganegaraan di Amerika Serikat yang dapat dinilai sebagai pendidikan kewarganegaraan yang mengarah lebih dekat ke dalam kontinum pendidikan kewarganegaraan maksimal.

**Kata Kunci:** pendidikan kewarganegaraan, demokratis, Amerika Serikat.

## Abstract

*Citizenship education provided by each country aims to guide and shape the character of good citizens and create democratic citizens. The United States of America is a country that initiates citizenship education lessons and is one of the superpowers in the world because of its economic and political strength. The method used in writing this article uses the literature review method with the main data source, namely library data, consisting of books, journals, and internet sites related to the topic. The data analysis technique used in this article is content analysis. The discussion of this article is focused on the national policy and content of the civic education curriculum in the United States which can be assessed as civic education leading closer to the continuum of maximal civic education.*

**Keywords:** citizenship education, democratic, United States of America.

## PENDAHULUAN

Pendidikan kewarganegaraan memiliki arti penting di berbagai negara di dunia dan saat ini telah banyak mendapat perhatian. Makna pendidikan kewarganegaraan dapat berubah bergantung pada politik, situasi politik dan akar sejarah negara (Altintas dan Karaaslan, 2019: 1567). Pendidikan kewarganegaraan diberikan di setiap negara dengan tujuan untuk membimbing dan membentuk karakter warga negara yang baik sehingga dapat mewujudkan warga negara yang sadar bela negara. Menurut Lee, Grossman, Kennedy, dan Fairbrother (2008) menyatakan bahwa pendidikan kewarganegaraan tidak dapat berdiri sendiri, melainkan terdiri atas norma-norma budaya, geopolitik, prioritas politik, harapan sosial, aspirasi pembangunan ekonomi nasional, dan sejarah pada masa lalu. Di sisi lain, Gibson dan Levine (Cohen, 2018: 2) menjelaskan bahwa pendidikan kewarganegaraan dapat didefinisikan sebagai kursus membantu orang muda mempersiapkan diri menjadi warga negara yang kompeten dan bertanggung jawab sepanjang hidup mereka dengan mempelajari dan menerapkan keterampilan, pengetahuan, serta sikap. Sebuah laporan tentang Civic Mission of Schools, Carnegie Corporation of New York and Center for Information and Research on Civic Learning and Engagement (CIRCLE) menjelaskan bahwa karakteristik warga negara yang kompeten dan bertanggung jawab dihasilkan dari pendidikan kewarganegaraan yang efektif (Street Law, Inc 2018). Pendidikan kewarganegaraan yang efektif membutuhkan berbagai langkah dari pemangku kepentingan pendidikan di setiap tingkatan agar dapat mencapai keberhasilan dalam

memberikan pengalaman pembelajaran pendidikan kewarganegaraan yang berkualitas tinggi sehingga dapat membentuk warga negara yang baik. Sebagaimana yang dikatakan oleh Colby, et al (2003: 100) bahwa pendidikan kewarganegaraan yang sepenuhnya efektif membutuhkan kapasitas yang berkembang dengan baik. Kathleen Cotton (Billings, 2005: 71-72) mengemukakan bahwa terdapat 12 kritik utama mengenai pendidikan kewarganegaraan diantaranya yaitu kurangnya pembelajaran yang diarahkan untuk mengembangkan keterampilan dalam berpikir, walaupun dalam kenyataannya guru telah memiliki kompetensi agar siswa didorong untuk berpikir kritis, melatih pemecahan masalah, dan mengambil suatu keputusan; pembelajaran hanya terfokus kepada guru sebagai pengontrol siswa dan siswa harus patuh, sehingga siswa tidak dibiasakan untuk berperilaku demokratis yang mampu mengkomunikasikan pemikiran-pemikiran individu dan mengikuti atau menggalakkan aksi sosial; kurikulum yang dijalankan untuk tingkat sekolah rendah juga berdasar atas rendahnya tingkat pendidikan tersebut, hasilnya siswa dengan tingkat pendidikan rendah juga tidak paham atas suatu fenomena kenegaraan dan tidak bisa menindaklanjuti fenomena tersebut, siswa hanya bisa mengkritisi tanpa etika dan alasan yang relevan. Berdasar atas Cotton, memunculkan pertanyaan-pertanyaan mengenai permasalahan kewarganegaraan, yaitu bagaimana bisa paradoks mengenai kepasifan, non kontroversial kurikulum dan instruksi di dalam pembelajaran dapat membangun dan mempersiapkan siswa menjadi berkewarganegaraan aktif di dalam demokrasi masyarakat?

Setiap negara memiliki cara yang berbeda-beda dalam memberikan pendidikan kewarganegaraan bagi warga negaranya. Sebagaimana Elmore dan Sykes (Moris dan Cogan 2001: 112) menyatakan bahwa tindakan kebijakan yang dirancang untuk mewujudkan maksud sangat bervariasi di seluruh masyarakat dalam hal sifat instrumen kebijakan yang digunakan. Selaras dengan Elmore dan Sykes, Julianti, dkk (2019: 30) mengatakan bahwa semua negara-bangsa pasti menghendaki untuk menghasilkan warga negara yang baik, meskipun harus membayarnya dengan masa berlaku kurikulum atau nilai-nilai ideologis kepada lulusan sekolah. Dengan demikian, kebijakan kurikuler perlu mempertemukan kepentingan yang beragam tersebut untuk mewujudkan warga negara ideal bangsanya. Dalam tulisan ini akan fokus membahas pendidikan kewarganegaraan di Amerika Serikat yang merupakan negara asal pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Amerika Serikat merupakan salah satu negara adikuasa di dunia karena kekuatan ekonomi dan politiknya, serta merupakan negara berpengaruh di dunia. Pelajaran *Civics* atau pendidikan kewarganegaraan mulai diperkenalkan di Amerika Serikat dalam rangka “mengamerikakan bangsa Amerika” atau yang terkenal dengan nama “*Theory of Americanization*”. Bangsa Amerika berasal dari berbagai bangsa yang datang di Amerika Serikat dan untuk menyatukan menjadi bangsa Amerika maka perlu diajarkan *Civics* bagi warga negara Amerika Serikat. Dalam taraf tersebut, pelajaran *Civics* membicarakan tentang *government*, hak dan kewajiban warga negara dan *Civics* merupakan bagian dari ilmu politik (Mahrudin, 2012: 107). Namun terdapat kesenjangan prestasi akademik yang terus-menerus dan siswa yang semakin beragam di seluruh dunia, banyak negara menghadapi kesulitan serius dalam mengatasi ketimpangan pendidikan. Di negara maju seperti Amerika Serikat, skenarionya adalah sangat menantang bagi guru yang bekerja dalam konteks pelaksanaan segregasi sekolah didorong oleh kesenjangan sosial-ekonomi yang terus-menerus, migrasi, dan etnis, ras, budaya, dan perbedaan linguistik (Gay, 2015; Nieto, 2017).

Pembahasan artikel ini difokuskan pada kebijakan nasional dan konten kurikulum pendidikan kewarganegaraan di Amerika Serikat. Tujuan dari penulisan artikel ini yaitu (1) untuk mendeskripsikan pengembangan pendidikan kewarganegaraan ditinjau dari aspek kebijakan nasional di negara Amerika Serikat, dan (2) untuk mendeskripsikan pengembangan pendidikan kewarganegaraan ditinjau dari aspek konten kurikulum di negara Amerika Serikat.

## METODE

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan artikel ini yaitu pendekatan kualitatif dengan metode *literature review*. Metode tersebut merupakan sebuah metode pencarian literatur baik nasional maupun internasional yang dilakukan dengan menggunakan *database Mendeley, ScienceDirect, dan Proquest*. Metode ini dipilih untuk mengidentifikasi sumber data yang digunakan oleh penulis dalam membangun hubungan konsep antar sumber data. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder. Data yang diperoleh dari bahan kepustakaan atau literatur yang mempunyai hubungan dengan objek penelitian. Sumber data yang utama dalam artikel ini yaitu data kepustakaan, terdiri dari buku, jurnal, dan situs internet yang terkait dengan topik pendidikan kewarganegaraan di Amerika Serikat. Teknik analisis data yang digunakan dalam artikel ini adalah analisis isi (*content analysis*), yaitu analisis yang digunakan untuk mengetahui kecenderungan isi dari suatu informasi tertulis. Sebagaimana pendapat Berelson (1952), bahwa analisis isi merupakan teknik yang berorientasi kualitatif, ukuran kebakuan diterapkan pada satuan-satuan tertentu biasanya dipakai untuk menentukan karakter dokumen-dokumen kemudian membandingkannya. Dalam artikel ini untuk memperoleh hasil yang valid, penulis memilih, membandingkan, dan menggabungkan berbagai sumber data referensi yang ada sehingga data yang ditemukan relevan dan saling mendukung.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pendidikan Kewarganegaraan di Amerika Serikat

Di Amerika Serikat, keputusan kurikuler diserahkan kepada masing-masing negara bagian mengenai bagaimana cara yang akan digunakan dalam mempromosikan kewarganegaraan dan bagaimana cara mempromosikannya, sementara Standar Nasional hanya menyarankan konten. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Moris dan Cogan (2001: 110) bahwa: 1) *no national policy for civics (voluntary curriculum standards) states and local districts de"ne curriculum*; 2) *national Standards suggest content*; 3) *civics is traditionally infused across the social studies curriculum and often one year of a formal civics course is required in secondary school*; 4) *informal civics training occurs in service-learning projects and extracurricular activities*.

Pada kurikulum, pengetahuan/nilai yang dipromosikan pendidikan kewarganegaraan yaitu, pertama, penekanan pada pengembangan warga negara yang produktif yang dapat menggunakan hak mereka sebagai warga negara baik di arena nasional maupun internasional; kedua, mendorong partisipasi yang penuh informasi dan bertanggung jawab dalam kehidupan politik oleh warga negara yang kompeten berkomitmen pada nilai-nilai fundamental dan prinsip-prinsip demokrasi konstitusional; ketiga, membekali siswa untuk mengembangkan kemampuan untuk membuat keputusan yang terinformasi dan beralasan untuk kepentingan publik sebagai warga negara dari masyarakat demokratis yang beragam secara budaya dalam dunia yang saling bergantung (Moris dan Cogan (2001: 115)).

Pendidikan kewarganegaraan di Amerika Serikat menggunakan pendekatan *integrated* sebagai bagian dari suatu mata pelajaran terpadu *social studies*. Terdapat pengorganisasian pendidikan kewarganegaraan pada tingkat dasar dan menengah di Amerika Serikat. Berikut disajikan dalam tabel 1 dan 2.

**Tabel 1. Pengorganisasian Pendidikan Kewarganegaraan Tingkat Dasar**

<i>Country</i>	<i>Terminology</i>	<i>Approach</i>	<i>Hours per week</i>
<i>USA Kentucky</i>	<i>Social studies</i>	<i>Statutory core integrated</i>	<i>Time specified per week varies</i>

Sumber: Kerr (1999: 14)

**Tabel 2. Pengorganisasian Pendidikan Kewarganegaraan Tingkat Menengah**

<i>Country</i>	<i>Terminology</i>	<i>Approach</i>	<i>Hours per week</i>
<i>USA Kentucky</i>	<i>Social studies including civics and government</i>	<i>Statutory core and separated and integrated</i>	<i>Time specified per week varies among state</i>

Sumber: Kerr (1999: 15)

Tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah pembentukan budaya politik siswa yang terungkap dasar yang diperlukan dari budaya ideologis seseorang. Sifat khusus dari pendidikan politik adalah masyarakat dalam tugas-tugas tertentu yang bertujuan untuk mengembangkan konsensus politik pandangan dunia multikultural yang disediakan oleh sistem pendidikan kewarganegaraan. Arah utama pendidikan kewarganegaraan di Amerika Serikat adalah pengembangan kesadaran politik nilai budaya, kesadaran hukum, budaya hubungan antar etnis, motivasi kerja, pendidikan nilai moral. Pemahaman tentang kebebasan. Di samping itu, yang paling penting adalah gagasan tentang lingkungan multikultural, yang bertujuan mempersiapkan setiap warga negara untuk hidup berdampingan. Oleh sebab itu pendidikan kewarganegaraan di Amerika Serikat berfokus pada pembentukan warga negara yang *multicultural* tidak terbatas pada etnosentrisme (Kovalchuk, 2015: 14).

Pengembangan kapasitas kurikulum pendidikan kewarganegaraan di Amerika Serikat yaitu materi kurikulum dibuat oleh sejumlah organisasi seperti The Center for Civic Education (CCE) dan The National Council for Social Studies (NCSS). Variabel pengembangan guru menurut negara bagian dilakukan dengan koordinasi nasional melalui organisasi seperti CCE dan NCSS. Strategi implementasi kurikulum dilakukan secara tersebar dan tidak terorganisir (Hughes, et al, 2010: 298).

## **Pembahasan**

### **Kebijakan Nasional Pendidikan Kewarganegaraan di Amerika Serikat**

Kekuasaan dapat memberikan corak dari setiap kebijakan yang akan diambil oleh pengambil kebijakan (negara). Penguasa dengan kekuasaan dan kekuatan yang dimiliki dapat menentukan ingin seperti apa aspek-aspek kehidupan yang harus dijalankan menurut kepentingannya. Tidak hanya pada aspek kenegaraan, ekonomi, sosial, budaya, bahkan pendidikan pun dapat dijadikan alat penguasanya. Dalam konteks pendidikan, menurut Dewey pada hakikatnya pendidikan merupakan suatu proses penggalan dan pengolahan pengalaman secara terus-menerus. Inti pendidikan adalah usaha untuk terus-menerus menyusun kembali dan menata ulang pengalaman hidup peserta didik. Pendidikan harus memampukan peserta didik untuk menafsirkan dan memaknai rangkaian pengalamannya sedemikian rupa sehingga ia terus bertumbuh dan diperkaya oleh pengalaman tersebut.

Pendidikan Kewarganegaraan adalah subjek yang bertanggung jawab tentang bagaimana membentuk warga negara yang baik (Dewantara, dkk, 2019: 401). Pengembangan

kebijakan pendidikan kewarganegaraan dipengaruhi oleh negara, hal ini dapat dilihat melalui keterlibatan negara dalam merancang dan mengarahkan kurikulum sekolah dalam menanamkan nilai-nilai kewarganegaraan pada siswa. Kurikulum pendidikan kewarganegaraan yang baik menurut Olibie dan Akudolu (Nurdin, 2017: 70) harus memungkinkan seseorang untuk mengidentifikasi atau memberikan makna atau signifikansi terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan manusia di bumi, seperti ide atau konsep termasuk patriotisme dan hak-hak minoritas, masyarakat sipil, dan konstitualisme. Pendidikan kewarganegaraan secara luas mencerminkan sistem pemerintahan yang berlaku di setiap negara. Di Amerika Serikat, keputusan kurikuler diserahkan kepada masing-masing negara bagian mengenai bagaimana cara yang akan digunakan dalam mempromosikan kewarganegaraan dan bagaimana cara mempromosikannya, sementara Standar Nasional hanya menyarankan konten. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Moris dan Cogan (2001: 110) bahwa: 1) *no national policy for civics (voluntary curriculum standards) states and local districts dene curriculum*; 2) *national Standards suggest content*; 3) *civics is traditionally infused across the social studies curriculum and often one year of a formal civics course is required in secondary school*; 4) *informal civics training occurs in service-learning projects and extracurricular activities*.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa tanggung jawab dan inisiatif kebijakan pendidikan kewarganegaraan dalam menentukan kurikulum diserahkan kepada Negara Bagian (setingkat Propinsi) dan Pemerintah Daerah/Distrik (setingkat Kabupaten/Kota). Di Amerika Serikat terdapat 50 negara bagian dan 15.358 distrik. Jadi sebanyak itu lembaga yang diberi kewenangan dan otonomi untuk mengelola pendidikan. Sehingga menurut hemat penulis, karakteristik utama kebijakan pendidikan kewarganegaraan di Amerika Serikat adalah menonjolnya desentralisasi. Pemerintah Pusat sangat memberi otonomi seluas-luasnya kepada Pemerintah di bawahnya, yaitu Negara Bagian dan Pemerintah Daerah (Distrik). Sistem sekolah di Amerika Serikat semuanya menganut sistem desentralisasi karena tidak ada ketentuan konstitusi yang menyatakan pendidikan diatur oleh pemerintah federal. Artinya semua sistem sekolah ada di bawah kewenangan negara bagian. Hal ini membawa implikasi kebijakan tentang keuangan dan pengelolaan sekolah, kurikulum, dan pembelajaran, pengadaan buku teks dan materi kurikuler lainnya, pengadaan guru, dan upaya pembaruan berada pada kewenangan pemerintah negara bagian.

Pendidikan kewarganegaraan secara tradisional dimasukkan ke dalam kurikulum studi sosial dan seringkali dalam satu tahun diperlukan kursus kewarganegaraan formal di sekolah menengah. Menurut Kurniawan (2021: 241) mengartikan social studies atau disebut juga studi sosial sebagai studi terintegrasi dari ilmu-ilmu sosial dan humaniora untuk mempromosikan dan membangun kompetensi warga negara, dengan tujuan utama untuk membantu generasi muda mengembangkan kemampuan mengambil keputusan yang jernih dan bernalar untuk kepentingan umum sebagai warga negara dalam masyarakat yang beragam dan mendunia. Selain itu, pelatihan kewarganegaraan secara informal diberikan dalam proyek-proyek pembelajaran layanan dan kegiatan ekstrakurikuler.

### **Konten Kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan di Amerika Serikat**

Sederet generalisasi dapat ditawarkan tentang bagaimana pendidikan kewarganegaraan dikonstruksi sebagai bagian dari kurikulum sekolah. Di Amerika Serikat, beberapa siswa mempelajari *Civics and Government* atau *Civics* dan nilai-nilai kewarganegaraan dimasukkan ke dalam kurikulum studi sosial. Pendidikan kewarganegaraan biasanya ditugaskan untuk studi sosial bidang kurikulum, penilaian pembelajaran kewarganegaraan bukan merupakan elemen kunci dari latihan penilaian masuk perguruan tinggi. Buku teks disediakan di negara bagian yang memiliki komponen pendidikan

kewarganegaraan, tetapi hal ini bersifat opsional. Sementara kegiatan berbasis masyarakat misalnya KKN di luar sekolah juga digalakkan secara aktif. Dalam hal fokus isi kurikulum, delapan kelompok nilai dipromosikan ke tingkat yang lebih besar atau lebih kecil dalam semua program yaitu, penanaman diri, nilai-nilai keluarga, nilai-nilai demokrasi, pemerintahan yang adil, kehidupan ekonomi, kohesi/ keragaman sosial, masyarakat sipil, dan identitas nasional. Amerika Serikat lebih menekankan pada bidang-bidang yang terkait dengan demokrasi, proses politik, hak asasi manusia, dan ekonomi pasar bebas.

Amerika Serikat tidak mempunyai sistem pendidikan yang terpusat atau yang bersifat nasional, namun ada rumusan tentang tujuan pendidikan yang berlaku secara nasional. Tujuan sistem pendidikan Amerika Serikat secara umum dirumuskan dalam 5 poin sebagai berikut: 1) untuk mencapai kesatuan dalam keragaman; 2) untuk mengembangkan cita-cita dan praktik demokrasi; 3) untuk membantu pengembangan individu; 4) untuk memperbaiki kondisi sosial masyarakat; dan 5) untuk mempercepat kemajuan nasional (Wulandari, 2008: 418-419). Sementara tujuan pendidikan kewarganegaraan di Amerika Serikat cenderung menekankan nilai-nilai yang berfokus pada hak dan tanggung jawab warga negara, keragaman sosial, dan pengetahuan kontroversial.

Menurut Doganay (2012) pendidikan kewarganegaraan harus terdiri tidak hanya pengetahuan, nilai dan keterampilan, tetapi juga mencakup penerapan pengetahuan, nilai dan keterampilan tersebut dalam situasi kehidupan nyata dengan berpartisipasi secara aktif. Dalam kurikulum Amerika Serikat, pengetahuan/nilai yang dipromosikan pendidikan kewarganegaraan yaitu, pertama, penekanan pada pengembangan warga negara yang produktif yang dapat menggunakan hak mereka sebagai warga negara baik di arena nasional maupun internasional; kedua, mendorong partisipasi yang penuh informasi dan bertanggung jawab dalam kehidupan politik oleh warga negara yang kompeten berkomitmen pada nilai-nilai fundamental dan prinsip-prinsip demokrasi konstitusional; ketiga, membekali siswa untuk mengembangkan kemampuan untuk membuat keputusan yang terinformasi dan beralasan untuk kepentingan publik sebagai warga negara dari masyarakat demokratis yang beragam secara budaya dalam dunia yang saling bergantung (Moris dan Cogan (2001: 115)). Sementara menurut Kurniawan (2021: 244) mengatakan bahwa pendidikan kewarganegaraan dalam *social science* atau *social studies* di Amerika Serikat pada dasarnya bermula pada gagasan mengenai *the ideal citizen* sebagai *informed and reasoned decision maker* yang *competent, confident, and committed*. Seorang warga negara yang demokratis seharusnya tampil sebagai pengambil keputusan yang cerdas dan bernalar (*informed and reasoned decision maker*). Oleh karena itu dibutuhkan *knowledge* (pengetahuan), *skills: civic participation* (keterampilan partisipasi warga negara), serta *beliefs: civic virtues* (kepercayaan berupa kebajikan warga negara). Menyatunya ketiga aspek tersebut akan menghasilkan warga negara yang berkemampuan (*competent*), berkeyakinan diri (*confident*) dan kesediaan untuk berbakti dan mengabdikan diri (*commitment*).

Di Amerika Serikat, pendidikan kewarganegaraan menggunakan pendekatan *integrated* sebagai bagian dari suatu mata pelajaran terpadu *social studies*. Terdapat pengorganisasian pendidikan kewarganegaraan pada tingkat dasar dan menengah di Amerika Serikat. Berdasarkan tabel 1 pada hasil, dapat diketahui pengorganisasian pendidikan kewarganegaraan pada tingkat pendidikan dasar di Amerika Serikat termuat dalam mata pelajaran *social studies*. Kedudukan dalam program pendidikan bersifat wajib yang dikemas sebagai materi inti yang terintegrasi (*statutory core integrated*). Beban belajar untuk setiap negara bagian bervariasi. Sementara pada tingkat pendidikan menengah disajikan pada tabel 2, dapat diketahui bahwa pengorganisasian pendidikan kewarganegaraan pada tingkat pendidikan menengah di Amerika Serikat termuat dalam mata pelajaran *social studies* dalam materi kajian *Civics and Government*. Kedudukan dalam program pendidikan bersifat wajib yang dikemas

sebagai materi inti yang terintegrasi atau berdiri sendiri. Beban belajar pada setiap negara bagian bervariasi. Berdasarkan kedua tabel tersebut, terlihat bahwa cara pengorganisasian pendidikan kewarganegaraan dalam kurikulum pendidikan dasar dan pendidikan menengah di Amerika Serikat menggunakan pendekatan *integrated* di semua tingkatan, pendidikan kewarganegaraan diajarkan sebagai bagian dari suatu mata pelajaran terpadu *social studies*.

*Social studies* juga mengidentifikasi adanya suatu pendidikan kewarganegaraan dalam kontinum minimal dan maksimal (Kerr, 1999: 13). Setiap kontinum memiliki karakteristik yang berbeda yang dapat mempengaruhi definisi dan pendekatan pendidikan kewarganegaraan. Karakteristik dari kontinum minimal dan maksimal dapat dilihat dalam tabel berikut.

**Tabel 3. Kontinum Pendidikan Kewarganegaraan**

<i>Minimal</i>	<i>Maximal</i>
<i>Thin</i>	<i>Thick</i>
<i>Exclusive</i>	<i>Inclusive</i>
<i>Elitist</i>	<i>Activist</i>
<i>Civics education</i>	<i>Citizenship education</i>
<i>Formal</i>	<i>Participative</i>
<i>Content led</i>	<i>Process led</i>
<i>Knowledge based</i>	<i>Values based</i>
<i>Didactic transmission</i>	<i>Interactive interpretation</i>
<i>Easier to achieve and measure in practice</i>	<i>More difficult to achieve and measure in practice</i>

Sumber: Kerr (1999: 12)

Berdasarkan tabel di atas, interpretasi minimal mendefinisikan pendidikan kewarganegaraan secara sempit yang hanya mewadahi aspirasi tertentu, berbentuk pengajaran kewarganegaraan, bersifat formal, terikat oleh isi, berorientasi pada pengetahuan, menitikberatkan pada proses pengajaran, dan hasilnya mudah diukur. Sementara interpretasi maksimal mendefinisikan pendidikan kewarganegaraan secara luas yang mewadahi berbagai aspirasi dan melibatkan berbagai unsur masyarakat, kombinasi pendekatan formal dan informal dengan menitikberatkan pada partisipasi peserta didik melalui pencarian isi dan proses interaktif di dalam maupun di luar kelas, hasilnya lebih sukar dicapai dan diukur karena kompleksnya hasil belajar. Hal serupa diungkapkan oleh McLaughlin (1992) yang membedakan antara kewarganegaraan minimal dan maksimal. Warga negara minimal, pada dasarnya patuh pada pemerintah yang diwujudkan dengan sikap taat hukum dan berjiwa publik tetapi dengan pertimbangan rasional dan penentuan nasib sendiri yang terbatas. Sementara warga negara maksimal adalah secara aktif mempertanyakan dan telah mencapai perspektif kritis yang tinggi tentang semua hal penting. Dengan demikian menurut hemat penulis pendidikan kewarganegaraan minimal hanya sebatas transfer pengetahuan, sementara pendidikan kewarganegaraan maksimal lebih dari itu hingga dapat membentuk warga negara pada taraf kritis terhadap hal-hal penting mengenai kewarganegaraan. Jika dianalisis berdasarkan kontinum tersebut, maka pendidikan kewarganegaraan di Amerika Serikat lebih mendekati pada kontinum maksimal.

## SIMPULAN

Karakteristik utama kebijakan pendidikan kewarganegaraan di Amerika Serikat yaitu menonjolnya desentralisasi. Hal tersebut dapat dilihat melalui tanggung jawab dan inisiatif kebijakan pendidikan kewarganegaraan dalam menentukan kurikulum diserahkan kepada

Negara Bagian (setingkat Provinsi) dan Pemerintah Daerah/Distrik (setingkat Kabupaten/Kota). Sistem sekolah di Amerika Serikat semuanya menganut sistem desentralisasi karena tidak ada ketentuan konstitusi yang menyatakan pendidikan diatur oleh pemerintah federal. Artinya semua sistem sekolah ada di bawah kewenangan negara bagian. Hal ini membawa implikasi kebijakan tentang keuangan dan pengelolaan sekolah, kurikulum, dan pembelajaran, pengadaan buku teks dan materi kurikuler lainnya, pengadaan guru, dan upaya pembaruan berada pada kewenangan pemerintah negara bagian.

Pengorganisasian pendidikan kewarganegaraan dalam kurikulum pendidikan dasar dan pendidikan menengah di Amerika Serikat menggunakan pendekatan *integrated* di semua tingkatan, pendidikan kewarganegaraan diajarkan sebagai bagian dari suatu mata pelajaran terpadu *social studies*. Dalam hal fokus isi kurikulum, delapan kelompok nilai dipromosikan ke tingkat yang lebih besar atau lebih kecil dalam semua program yaitu, penanaman diri, nilai-nilai keluarga, nilai-nilai demokrasi, pemerintahan yang adil, kehidupan ekonomi, kohesi/keragaman sosial, masyarakat sipil, dan identitas nasional. Tujuan pendidikan kewarganegaraan di Amerika Serikat cenderung menekankan nilai-nilai yang berfokus pada hak dan tanggung jawab warga negara, keragaman sosial, dan pengetahuan kontroversial. Pada kurikulum Amerika Serikat, pengetahuan/nilai yang dipromosikan pendidikan kewarganegaraan yaitu, pertama, penekanan pada pengembangan warga negara yang produktif; kedua, mendorong partisipasi politik warga negara yang kompeten sesuai prinsip demokrasi konstitusional; ketiga, membekali siswa untuk mengembangkan kemampuan membuat keputusan yang bijak untuk kepentingan publik sebagai warga negara dari masyarakat demokratis. Untuk menghasilkan warga negara yang berkemampuan (*competent*), berkeyakinan diri (*confident*) dan bersedia untuk berbakti dan mengabdikan diri (*commitment*), dibutuhkan *knowledge* (pengetahuan), *skills: civic participation* (keterampilan partisipasi warga negara), serta *beliefs: civic virtues* (kepercayaan berupa kebajikan warga negara). Pendidikan kewarganegaraan Amerika Serikat mengarah lebih dekat ke pendidikan kewarganegaraan maksimal, yaitu “Pendidikan untuk kewarganegaraan” yang mencakup pendekatan pendidikan tentang kewarganegaraan dan pendidikan melalui kewarganegaraan yang mengkaitkan pendidikan kewarganegaraan dengan pengalaman pendidikan seluruh siswa.

#### DAFTAR RUJUKAN

- Altintas, Irem Namli., Hüseyin Karaaslan. (2019). Study on effective citizenship education and its dimensions. *Universal Journal of Educational Research*, 7(7), 1567-1579. DOI: 10.13189/ujer.2019.070711
- Billings, Gloria Ladson. (2005). “Differing concepts of citizenship: school and communities as sites of civic development,” in: nel noddings, *educating citizens for global awarness*. New York: Teachers College Press.
- Cohen, A. (2018). Typologies of citizenship and civic education: from ideal types to a reflective tool. *The Palgrave Handbook of Citizenship and Education*, 1–18. doi:10.1007/978-3-319-67905-143-1
- Colby, Anne., et al. (2003). *Educating citizens: preparing America’s Undergraduates*. United State of America: HB Printing.
- Dewantara, Jagad Aditya, et al. (2019). Pancasila as ideology and characteristics civic education in Indonesia. *International Journal for Educational and Vocational Studies*, 1(5), 400-405. DOI: 10.29103/ijevs.v1i5.1617
- Doğanay, A. (2012). A curriculum framework for active democratic citizenship education. Schools. *Curriculum and Civic Education for Building Democratic Citizens*, 19–39. doi:10.1007/978-94-6209-167-23



- Gay, G. (2015). The what, why, and how of culturally responsive teaching: International mandates, challenges, and opportunities. *Multicultural Education Review*, 7(3), 123–139. <https://eric.ed.gov/?id=EJ1131394>
- Grossman, D. L., Lee, W. O., & Kennedy, K. J. (Ed.). (2008). *Citizenship curriculum in Asia and Pacific*. Hong Kong, China: Springer.
- Hughes, A. S., Print, M., & Sears, A. (2010). Curriculum capacity and citizenship education: a comparative analysis of four democracies. *Compare: A Journal of Comparative and International Education*, 40(3), 293–309. doi:10.1080/03057920903395528
- Julianti, dkk. (2019). Pendidikan Kewarganegaraan sebagai wahana untuk meningkatkan kesadaran hidup yang lebih baik di era global. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, Vol. 16, No. 1, hlm. 29-38.
- Kerr, D. (1999). *Citizenship education in the curriculum: An international review*. England: nfer, QCA.
- Kovalchuk, V. (2015). Civic consciousness development of youth in the context of educational reforms: The US Experience. *Comparative Professional Pedagogy*, 5(2), 13–19. doi:10.1515/rpp-2015-0034
- Kurniawan, S. putra Tri. (2017). Citizenship education: social studies di USA (United States Of America). Di Triyani, Dkk (Ed). *Pendidikan Kewarganegaraan Perspektif Internasional*. Surakarta: Penerbit Pustaka Hanif.
- Mahrudin. (2012). *Pendidikan Kewarganegaraan dalam perspektif falsafah Poangka-Angkataka*. Diakses melalui <http://download.garuda.ristekdikti.go.id> pada tanggal 11 April 2021.
- McLaughlin, T.H. (1992.) Citizenship, diversity and education: a philosophical perspective. *Journal of Moral Education*, 21(3), 235-250.
- Morris, P., & Cogan, J. (2001). A comparative overview: civic education across six societies. *International Journal of Educational Research*, 35(1), 109–123. doi:10.1016/s0883-0355(01)00009-x
- Nieto, S. (2017). Re-imagining multicultural education: new visions, new possibilities. *Multicultural Education Review*, 9(1), 1–10. doi:10.1080/2005615x.2016.1276671
- Nurdin, E. S. (2017). Civic Education policies: Their effect on university students' spirit of nationalism and patriotism. *Citizenship, Social and Economics Education*, 16(1), 69–82. doi:10.1177/2047173416688039
- Street Law, Inc. (2018.) *Civic education in the 21st century an analytical and methodological global overview*. New York: United States Agency for International Development (USAID).
- Van der Ploeg, P. A. (2018). Dewey and citizenship education: schooling as democratic practice. *The Palgrave Handbook of Citizenship and Education*, 1–14. doi:10.1007/978-3-319-67905-1\_20-1